

BAB II

HUBUNGAN TIONGKOK- TAIWAN DAN ANCAMAN DALAM KEAMANAN

Hubungan permasalahan Tiongkok dan Taiwan sudah sangat lama terjadi yang bermula dengan konflik-konflik yang kecil hingga konflik yang besar yang dikhawatirkan akan adanya perang terbuka. Taiwan memiliki arti yang penting bagi Tiongkok, karena apabila Taiwan berhasil memerdekakan diri dan lepas dari Tiongkok maka itu merupakan suatu kelemahan bagi Tiongkok, apabila Taiwan tetap menjadi bagian dari Tiongkok maka itu merupakan kekuatan bagi Tiongkok. Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok apabila Taiwan lepas dari Tiongkok itu merupakan suatu pukulan telak bagi persatuan nasional Tiongkok. Oleh karena itu, kepentingan reunifikasi harus segera dilakukan karena apabila kehilangan Taiwan maka akan memberikan implikasi yang mendalam dan cukup kompleks bagi Tiongkok. Adanya deklarasi kemerdekaan oleh Taiwan maka setara dengan deklarasi perang bagi Tiongkok (Prasetya, 2014, hal. 52).

Penulisan bab ini akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *Pertama*, Dinamika hubungan Tiongkok dan Taiwan pada masa Xi Jinping: *Kedua*, Posisi Taiwan sebagai Ancaman Keamanan Tiongkok: *Ketiga*, Analisis ancaman Keamanan posisi Taiwan pada Tiongkok. Kemudian, pada akhir pembahasan akan disimpulkan kembali secara garis besar, dari semua yang telah dibahas pada bab II ini dan pentingnya data-data yang telah didapatkan.

2.1 DINAMIKA HUBUNGAN TIONGKOK DAN TAIWAN PADA MASA XI JINPING

Pada tahun 1990an hingga 2008, dinamika politik korosif mendominasi hubungan politik antara Tiongkok dan Taiwan. Pada saat itu, kedua negara tersebut saling menaruh

curiga dan masing-masing negara mempersiapkan berbagai cara untuk mewujudkan kepentingan negaranya (Bush, 2010). Dasar dari konflik antara Tiongkok dengan Taiwan salah satunya adalah; *Pertama*, adanya keengganan presiden Tsai dalam menerima konsensus 1992. Yang mana telah disebutkan pada konsensus 1992 bahwa hanya ada *One China Policy* (Albert, 2016).

Kedua, adanya perang sipil yang masih belum berakhir secara resmi. Hal ini terjadi karena pemerintah Tiongkok tidak mengakui pemerintah di Taiwan (The Economist , 2014). Tiongkok menganggap bahwa Taiwan merupakan provinsi bagian dari wilayahnya, sehingga tidak memenuhi syarat dalam hubungan negara ke negara. Permasalahan dengan Taiwan dianggap paling penting saat Tiongkok mengetahui bahwa Taiwan memiliki hubungan dengan Amerika Serikat. Tiongkok berharap bahwa Amerika Serikat tetap mematuhi adanya prinsip *One China Policy*. Kebijakan *One China Policy* membuat Taiwan harus tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok (Bush, 2017, hal. 3).

Kebijakan *One China Policy* mendapat reaksi negatif dari Taiwan, karena Taiwan tidak berkeinginan untuk bergabung dengan Tiongkok dan dengan satu pemerintahan yang sama. Taiwan menganggap bahwa negaranya telah berdaulat secara *de facto* dan sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah negara. Walaupun Taiwan memberikan reaksi negatif, Tiongkok tetap menjalankan kebijakan *One China Policy* dengan membuat aturan yang ketat bagi negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok tidak boleh menjalin hubungan dengan Taiwan dengan kata lain, dalam *One China Policy* ini negara lain harus menghormati dan mengakui kebijakan tersebut dan hanya memilih satu pemerintahan saja apabila ingin tetap bekerja sama dengan Tiongkok (Nabhila, 2017, hal. 5).

Pada bulan Oktober 2013, Xi Jinping diangkat menjadi Presiden Tiongkok. Xi memiliki kepemimpinan yang berbeda yang mempunyai sikap tegas dan keras. Pada tahun 2015, terdapat pertemuan bersejarah antara Xi Jinping dan Ma Ying-Jeou yang saat itu

menjadi Presiden Taiwan di Singapura. Setelah sejak 70 tahun berkonflik dan selama itu pula kedua Presiden Tiongkok dan Taiwan tidak pernah bertatap muka. Tentunya ini merupakan sebuah awal untuk mencoba menjalin hubungan dengan baik antara kedua negara tersebut (Philips, 2015).

Dalam konflik Tiongkok dan Taiwan hubungan keduanya sempat mulai membaik, walaupun secara diplomatis masih berseteru, namun dalam kerja sama bidang ekonomi Tiongkok dan Taiwan bekerja sama dengan baik. Terdapat dua alasan kedua negara mulai membaik. *Pertama*, adanya saling klaim membuat kedua negara telah lelah, dan adanya militer untuk perang akan memakan banyak biaya dan akan menimbulkan korban jiwa apabila hal tersebut dapat terjadi. *Kedua*, Taiwan sebagai negara demokratis sehingga banyak masyarakat yang menentang dan memprotes perjanjian dengan Tiongkok (Armandhanu, 2015).

Hubungan yang membaik antara Tiongkok dan Taiwan tampaknya tidak berlangsung lama sejak Taiwan berganti Presiden menjadi Tsai Ing-wen, yang mana kedua belah pihak tidak menyepakati adanya pembicaraan mengenai saling meningkatkan kepercayaan dan penandatanganan persetujuan dalam kerja sama ekonomi dan pariwisata (VOA Indonesia, 2016).

Pada tahun 2016, Tsai Ing-wen diangkat menjadi presiden pertama perempuan di Taiwan. Yang mana, pada saat pemilu terjadi Tiongkok terus memantau hasil pemilihan presiden sehingga berakibat adanya penolakan dari Tiongkok atas adanya pemilu yang diselenggarakan. Tiongkok tetap berusaha mengatakan bahwa urusan Taiwan merupakan urusan internal bagi Tiongkok. Sehingga Tiongkok menegaskan kembali adanya konsensus 1992 yang harus dihormati (Hidriyah, 2016, hal. 6).

Presiden Tsai Ing-wen terus berupaya mendorong kemerdekaan Taiwan dengan berbagai cara. Oleh karena itu Xi Jinping memiliki sebuah tekad untuk menggagalkan upaya

Taiwan untuk dapat memerdekakan diri dari Tiongkok, dan menegaskan untuk tetap menjunjung tinggi prinsip *One China Policy*. Tiongkok tetap mengklaim Taiwan meski Taiwan sudah lebih dari 70 tahun memerintah sendiri, Tiongkok masih bersikeras bahwa kedua belah pihak berada pada satu bendera, namun presiden Taiwan Tsai Ing-wen menolak untuk berdiskusi tentang hal tersebut (Horton, 2018).

Xi Jinping tentunya tidak tinggal diam, Xi telah menunjukkan kesediaan untuk meningkatkan pengawasan dan meningkatkan tekanan yang bertujuan untuk membatasi kemampuan Tsai dalam memerintah. Pada Mei 2016, Kantor Urusan Taiwan di Beijing mengungkapkan bahwa adanya penghentian komunikasi penghubung utama Taiwan dengan Dewan Urusan Daratan di Taipei. Tidak hanya itu, Xi juga membatasi pariwisata ke Taiwan, kecuali penerbangan sipil dan kesehatan global. Serta, menekan perusahaan global yang ingin bekerja sama dengan Taiwan, tetap menyebut provinsi Tiongkok bukan Taiwan (Hernandez, 2016).

Pada tahun 2015, Tiongkok berusaha keras membangun pasukan untuk dapat menyerang Taiwan. Tiongkok memperkuat angkatan laut dan udara untuk dapat mencegah adanya intervensi pasukan asing dalam invasi apapun. Tiongkok membuat strategi baru untuk Taiwan yang dapat menyerang Taiwan pada waktu yang mendatang. Meskipun seperti itu, Tsai Ing-wen tetap berusaha keras untuk mempertahankan status quo (Tiffany, 2016).

Pada tahun yang sama, Tiongkok telah mengeluarkan sebuah undang-undang yang berisikan tentang ancaman aksi militer apabila Taiwan mendesak ingin mengumumkan kemerdekaan. Tiongkok telah mempersiapkan rudal yang sudah mengarah ke Taiwan yang siap akan ditembakkan apabila Taiwan tetap memberontak (Armandhanu, 2015).

Pada tahun 2016 hingga tahun 2017, Tiongkok telah menggelar latihan militer dan beberapa kali memperlihatkan Taiwan bahwa Tiongkok mempunyai militer yang kuat dari Taiwan. Taiwan pun juga tidak tinggal diam dalam menyikapi Tiongkok. Taiwan juga

menggelar latihan militer dan memperkuat militer agar apabila terjadi serangan dari Tiongkok, Taiwan dapat melawan militer Tiongkok. Taiwan memiliki hubungan kerja sama dengan Amerika Serikat, salah satunya Taiwan terus membeli senjata dari Amerika Serikat. Amerika Serikat mengungkapkan bahwa penjualan senjata ke Taiwan mencapai \$1,4 miliar. Berkisar pada tahun 1979 dan 2017, Taiwan menduduki peringkat ke-9 sebagai penerima senjata terbesar di dunia (Albert, 2016).

Walaupun hubungan Taiwan dan Tiongkok masih berkonflik, hal tersebut tidak menghalangi Tsai untuk membeli senjata dari Amerika Serikat. Amerika Serikat menyetujui pembelian senjata tersebut karena adanya kerja sama tersebut akan meningkatkan lapangan kerja untuk enam negara bagian. Tsai tidak hanya membeli senjata namun juga melakukan pembelian pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat. Adanya penjualan senjata tersebut, menambah ketegangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Amerika Serikat telah menunjukkan dalam beberapa dekade terakhir bahwa Amerika Serikat mendukung untuk adanya keseimbangan lintas selat. Namun, tindakan Amerika Serikat membantu dalam urusan pertahanan Taiwan. Hal tersebut jelas membuat Tiongkok tegas untuk menentang penjualan senjata ke Taiwan (Kertopati, 2017).

Pada tahun 2017, Tiongkok mengarahkan rudal - rudal ke Taiwan dengan jarak menengah sebagai bagian dari ancaman militernya ke pulau Taiwan. Menteri Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa terdapat rudal DF-16 yang akan menyerang Taiwan yang telah dipasang oleh pasukan roket PLA. Para ahli militer berpendapat bahwa rudal - rudal Tiongkok dapat menjangkau 1000-1500 km, rudal - rudal tersebut juga dapat mengenai sasaran dengan tepat dan cepat. Tiongkok mengancam hal tersebut karena Tiongkok telah melakukan modernisasi persenjataan dan memperkuat militernya (Kompas, 2017).

Tiongkok berusaha keras merangkul Taiwan agar tetap menjadi bagian dari Tiongkok, karena Taiwan memiliki arti penting bagi Tiongkok. Keberadaan Amerika Serikat membantu Taiwan, membuat usaha Tiongkok terhambat. Sehingga, Tiongkok mempunyai strategi lain dalam membuat Taiwan untuk tetap menjadi bagian dari Tiongkok. Tiongkok membangun pertahanan nasional dan membangun angkatan bersenjata yang kuat sebagai upaya untuk menjamin keamanan bagi Tiongkok. Pada permasalahan dengan Taiwan kekuatan separatis dalam menyangkut 'Kemerdekaan Taiwan' masih menjadi ancaman terbesar bagi Tiongkok. Oleh karena itu, Tiongkok meningkatkan pertahanan nasionalnya dengan adanya strategi untuk menjaga keamanan Tiongkok (White Paper, 2015).

Permasalahan Tiongkok dan Taiwan yang tak kunjung usai ini tentunya bukan tanpa alasan. Lepasnya negara kecil seperti Taiwan, seharusnya bukan masalah yang besar bagi Tiongkok. Namun, dilihat dari betapa kerasnya Tiongkok untuk tetap menjadikan Taiwan tetap menjadi bagian dari Tiongkok, dapat diartikan bahwa lepasnya Taiwan merupakan ancaman yang serius bagi Tiongkok. Oleh karena itu, perlunya untuk mengetahui alasan Tiongkok untuk tetap mempertahankan Taiwan untuk tetap menjadi bagian dari negaranya.

2.2 POSISI TAIWAN SEBAGAI ANCAMAN KEAMANAN TIONGKOK

Perselisihan antara Tiongkok dan Taiwan yang belum berakhir ini masih menunjukkan sikap yang kurang harmonis di antara kedua negara tersebut. Bagi Tiongkok, Taiwan merupakan bagian dari wilayah Tiongkok yang berada di provinsi bagian Fujian yang memberontak. Tapi bagi Taiwan, Taiwan menganggap bahwa dirinya merupakan sebuah negara yang berdaulat sehingga berhak melakukan kerja sama atau hubungan dengan negara lain. Hubungan Tiongkok dan Taiwan masih belum berubah seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Tentunya terdapat suatu ancaman yang dirasakan oleh Tiongkok

apabila Taiwan berhasil melepaskan diri dari wilayahnya, yang mana ancaman dari posisi Taiwan, yaitu:

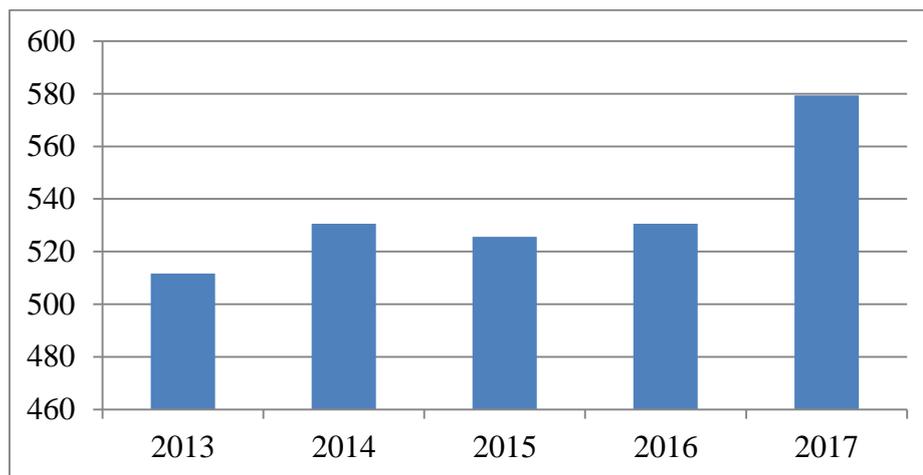
Pertama, Adanya hubungan antara Amerika Serikat dan Taiwan yang begitu erat. Amerika Serikat sering muncul dan memosisikan diri sebagai negara yang melindungi Taiwan atas konflik dengan Tiongkok. Apalagi, hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan dalam bidang persenjataan yang erat karena terikat pada Undang-undang. Undang-undang tersebut berisikan janji Amerika Serikat yang akan mengirimkan senjata ke Taiwan. Amerika Serikat berencana menjual persenjataan kepada Taiwan sebesar 1,4 miliar dolar AS (Kompas, 2017). Perjanjian tersebut membantu militer Taiwan menuju ke modernisasi militer. Pasokan senjata yang diberikan Amerika Serikat ke Taiwan tergolong senjata yang canggih, tidak hanya itu Amerika Serikat juga memberikan dukungan untuk kelengkapan militer Taiwan (Darmawan, 2015, hal. 2).

Hal tersebut yang membuat Tiongkok menjadi resah, karena dengan adanya bantuan senjata dari Amerika Serikat membuat Taiwan memiliki militer yang kuat. Dengan adanya peningkatan persenjataan yang lebih modern tersebut dapat membuat Taiwan merasa aman dan lebih percaya diri. Apalagi terdapat Undang-undang yang mengikat Amerika Serikat untuk membantu mempertahankan Taiwan dan sumber utama pasokan senjata untuk Taiwan. Sehingga dapat memunculkan potensi persaingan kekuatan atas kedua negara. Apabila Taiwan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Tiongkok maka dapat menggagalkan usaha Tiongkok untuk membuat Taiwan tetap menjadi negara bagiannya (Ramadhani, 2018, hal. 3).

Kedua, Taiwan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Taiwan merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi yang cukup kuat di kawasan Asia. Tiongkok melihat Taiwan sebagai wilayah yang subur dan menyimpan banyak potensi ekonomi yang akan berkembang dengan baik. Perekonomian Taiwan yang tumbuh

dengan pesat pada sektor industri dan perdagangan, Karena Taiwan memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, Ekonomi Taiwan sebagian besar didorong oleh manufaktur industri, terutama ekspor, mesin dan petrokimia (Riewpassa, 2014, hal. 3). Kebijakan pasar terbuka sangat berkembang dengan baik di Taiwan. Terlihat dalam GDP Taiwan dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan kenaikan, seperti terlihat pada grafik dalam USD Billion:

Grafik 2.2: GDP Taiwan (USD Billion)



Sumber: (TrendingsEconomics, 2018)

Oleh karena itu, Tiongkok berusaha keras agar Taiwan tidak memisahkan diri mengingat perekonomian Taiwan yang semakin kuat. Apabila Taiwan bersedia untuk menggabungkan diri dengan Tiongkok, maka potensi Tiongkok akan lebih besar dan perekonomian Tiongkok akan lebih kuat dari yang sebelumnya, meski perekonomian Tiongkok saat ini sudah kuat. Yang mana, posisi Tiongkok yaitu peringkat ke-2 setelah Amerika Serikat (Saragih, 2018).

Ketiga, Adanya usaha Taiwan untuk mendapatkan rekognisi sebagai negara berdaulat yang dapat berdampak pada eksistensi Tiongkok. Taiwan berusaha keras untuk dapat berpartisipasi dalam PBB, bukan pada saat pemerintahan Tsai Ing-wen saja namun pada

pemerintahan sebelum Tsai Ing-wen, presiden Taiwan juga melakukan hal yang sama (Ponniah, 2017).

Hal tersebut merupakan strategi keamanan ekonomi dan nasional Taiwan yang ingin bergerak maju tanpa memperhatikan hubungannya dengan Tiongkok (Tiezzi, 2018). Sampai saat ini, Taiwan belum mendapat pengakuan dari Internasional sebagai sebuah negara. Hal ini terdapat peran Tiongkok di dalamnya, yang mana Tiongkok berusaha keras untuk menghapus keberadaan Taiwan dalam mendapatkan pengakuan Internasional. Hal ini terlihat dengan adanya *One China Policy* yang mengikat Taiwan, bahwa hanya terdapat satu Tiongkok dan Taiwan merupakan bagian dari wilayah Tiongkok, sehingga negara lain yang bekerja sama dengan Tiongkok tidak diperkenankan bekerja sama dengan Taiwan (Maulana, 2016, hal. 5).

Keempat, Adanya demokrasi di Taiwan. Intimidasi Tiongkok memiliki efek yang negatif terhadap masyarakat Taiwan, khususnya pada kaum muda. Masyarakat Taiwan sangat mendukung dengan adanya demokrasi karena masyarakat dapat bebas menyuarakan pendapatnya dan bebas dari tekanan pemerintah. Sehingga, sangat tidak mungkin bagi masyarakat Taiwan untuk menerima sistem otoriter yang terdapat di Tiongkok, terutama dalam intimidasi dan tekanan. Terdapat sebuah survey yang mengungkapkan bahwa terdapat 71 % kaum muda Taiwan mendukung dengan adanya sistem demokrasi. (McAllister, 2016, hal. 48). Dari survey tersebut menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang berkomitmen dengan adanya demokrasi dan semakin banyak pula masyarakat yang membela Taiwan. Sehingga, hal tersebut dapat menimbulkan suatu ancaman bagi Tiongkok, adanya sistem demokrasi tersebut dapat membuat masyarakat Taiwan semakin jauh dengan Tiongkok karena Tiongkok memiliki sistem otoriter yang berlawanan dengan sistem demokrasi yang digunakan oleh Taiwan (Wang, 2017, hal. 3).

Kelima, Tiongkok tidak ingin Taiwan merdeka dan jatuh dalam kekuasaan negara lain. Permasalahan di Taiwan menjadi hambatan yang cukup besar dalam perkembangan

Tiongkok. Melihat dari sejarah, Taiwan pernah dijadikan basis untuk melancarkan serangan ke wilayah tenggara Tiongkok. Karena Taiwan dipandang sebagai wilayah yang strategis, yang mana posisi Taiwan terletak di antara Asia Timur dan Asia Tenggara. Pada era perang dingin, Amerika Serikat memanfaatkan Taiwan sebagai penangkal penyebaran paham komunis yang menyebar pada Asia Timur (Mubah, 2014, hal. 321).

Hal tersebut tentunya berlawanan dengan Tiongkok karena Tiongkok menggunakan paham Komunis. Apalagi, Taiwan menggunakan paham demokrasi yang sama dengan Amerika Serikat. Taiwan di hadapkan dengan dua negara yang memiliki kekuatan yang besar, yang mana kedua negara tersebut memiliki kepentingan yang berbeda, dan berusaha keras memperebutkan pengaruh di Taiwan. Sehingga, Tiongkok tidak ingin jika Taiwan jatuh pada kekuasaan negara lain. Karena, Taiwan tidak hanya dapat dimanfaatkan pada benteng pertahanan namun dapat juga dimanfaatkan pada perekonomian di Asia. Apabila Taiwan jatuh pada kekuasaan negara lain maka akan berdampak pada keamanan nasional Tiongkok (Mubah, 2014, hal. 322).

Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa terdapat ancaman-ancaman yang dirasakan oleh Tiongkok apabila Taiwan berhasil melepaskan diri dari Tiongkok dan mendapat pengakuan dari Internasional. Hal tersebut jelas membuat Xi Jinping terus berupaya mendorong adanya reunifikasi damai dengan Taiwan. Hal tersebut merupakan kepentingan dasar dari Tiongkok untuk tetap melindungi kedaulatan dan integrasi teritorial Tiongkok. Analisis terkait ancaman-ancaman yang telah dijabarkan akan dibahas pada subbab berikutnya.

2.3 ANALISIS ANCAMAN KEAMANAN POSISI TAIWAN PADA TIONGKOK

Pada subbab ini akan menganalisis ancaman yang termasuk sektor dalam keamanan menurut Barry Buzan. Data di atas sudah menerangkan apa saja ancaman yang akan terjadi

apabila Taiwan lepas dari bagian Tiongkok. Pada bab I telah dijelaskan, mengenai keamanan menurut Barry Buzan, yang dapat dibagi melalui lima sektor yaitu: militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Yang mana, tiap-tiap sektor tersebut terdapat ancaman di dalamnya. Namun, skripsi ini hanya menjelaskan tentang sektor militer, politik dan ekonomi saja, karena dalam sektor sosial dan lingkungan, tidak ada permasalahan yang menimbulkan ancaman bagi Tiongkok terhadap Taiwan.

Pertama, The Military Sector. Ancaman sektor militer menurut Buzan dalam buku *Security: A New Framework for Analysis* dalam sektor militer, objek referensinya adalah negara. Ancaman militer dapat mengancam fungsi-fungsi dasar perlindungan negara namun juga mengancam masyarakat (Barry Buzan, 1998, hal. 58).

Ancaman militer juga dapat melibatkan penggunaan kekuatan. Mencakup interaksi dua tingkat dalam pengelolaan kapabilitas persenjataan negara, yaitu secara ofensif maupun secara defensif (Barry Buzan, 1998, hal. 51).

Ancaman militer dapat dipengaruhi oleh sejarah, terutama dalam dampak pengalaman masa lalu, permusuhan historis, perang yang berulang. Dan juga ancaman militer dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik yaitu hubungan dalam ideologi politik yang tidak harmonis (Barry Buzan, 1998, hal. 60-61).

Posisi Taiwan bagi Tiongkok, hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan ini menjadi ancaman militer sesuai dengan yang diungkapkan oleh Buzan yang dapat dipengaruhi oleh faktor politik dan sejarah yang tidak harmonis (Barry Buzan, 1998, hal. 60-61). Sesuai dengan awal mula konflik Tiongkok dan Taiwan yang terdapat perang saudara pada waktu itu, sehingga membuat hubungan kedua negara tersebut tidak harmonis. Ancaman militer lainnya yaitu adanya hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan dalam pasokan persenjataan untuk memperkuat militer Taiwan, Hal ini juga telah dijelaskan oleh Buzan, di mana salah satu ancaman sektor militer adalah ketika terdapat penggunaan kekuatan.

Taiwan memperkuat kapabilitas persenjataan negara secara defensif yaitu melakukan pertahanan dalam menjaga keamanannya. Permasalahannya, dalam melakukan pertahanan untuk menjaga keamanan, Taiwan mendapat pasokan senjata dari Amerika Serikat, seperti yang telah dijelaskan pada subbab 2.2 (Ramadhani, 2018, hal. 3). Hal ini dilakukan oleh Amerika Serikat karena Amerika Serikat mendukung perkembangan kekuatan pertahanan Taiwan yang modern sehingga Taiwan mampu untuk mempertahankan kemampuan pertahanan diri (Taipei Times, 2018). Hal tersebut merupakan ancaman yang serius bagi Tiongkok, sesuai dengan apa yang dikatakan Zhu Songling, seorang profesor di Universitas Serikat Beijing, pada *Global Times* yaitu:

"The deepening US defense cooperation with Taiwan is an act of gross interference in China's domestic affairs. It's a very serious matter for the Chinese mainland" (Tiantian, 2018).

Kedua, The Political Sector. Ancaman sektor politik biasanya penolakan pengakuan kedaulatan atau legitimasi (Barry Buzan, 1998, hal. 142). Pada dasarnya negara merupakan sebuah entitas politik. Negara yang berdaulat membentuk sektor politik, sehingga negara terdiri dari tiga komponen yaitu ide, basis fisik dan institusi atau lembaga. Apabila terdapat hal yang mengancam dari ketiga komponen negara tersebut, termasuk dalam ancaman pada sektor politik yang dapat mengancam stabilitas tatanan politik (Barry Buzan, 1998, hal. 150).

Walaupun sebuah negara itu kuat dan berkuasa, ancaman politik masih menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Ancaman politik juga termasuk ideologi atau gagasan konstitutif lainnya yang mendefinisikan sebuah negara dan melibatkan kedaulatan (Barry Buzan, 1998, hal. 150).

Kedaulatan mendefinisikan sebagai sebuah negara, bahkan pelanggaran kecil dalam kedaulatan merupakan ancaman. Apapun yang dapat digambarkan sebagai pelanggaran kedaulatan dapat dikaitkan sebagai masalah keamanan (Barry Buzan, 1998, hal. 151).

Pada ancaman posisi Taiwan pada Tiongkok, terdapat 3 ancaman pada sektor politik, yaitu: adanya usaha Taiwan untuk mendapatkan rekognisi sebagai negara berdaulat; Tiongkok tidak ingin Taiwan merdeka dan jatuh dalam kekuasaan negara lain; serta adanya demokrasi di Taiwan. *Pertama*, pada adanya usaha Taiwan untuk mendapatkan rekognisi sebagai negara berdaulat, sesuai dengan ancaman pada sektor politik yang diungkapkan oleh Barry Buzan yaitu pada adanya penolakan pengakuan kedaulatan, dalam hal ini Taiwan menolak bahwa negaranya bagian dari Tiongkok, sehingga Taiwan berusaha keras agar mendapatkan pengakuan dari negara lain sebagai sebuah negara yang berdaulat (Barry Buzan, 1998, hal. 142). Hal ini merupakan ancaman bagi Tiongkok, karena apabila Taiwan mendapat pengakuan dari Internasional menjadi sebuah negara, kedaulatan negara Tiongkok dapat dipertanyakan.

Kedua, Tiongkok tidak ingin Taiwan merdeka dan jatuh dalam kekuasaan negara lain. Ancaman ini sesuai dengan yang telah diungkapkan oleh Barry Buzan mengenai pelanggaran kedaulatan karena kedaulatan mendefinisikan sebagai sebuah negara bahkan pelanggaran kecil dalam kedaulatan merupakan ancaman (Barry Buzan, 1998, hal. 151).

Hal ini merupakan ancaman bagi Tiongkok karena Tiongkok menganggap Taiwan merupakan sebuah provinsi yang termasuk dalam kedaulatan Tiongkok dan apabila Taiwan jatuh pada kekuasaan negara lain maka Tiongkok dianggap gagal menjaga stabilitas negaranya (Mubah, 2014, hal. 322).

Ketiga, adanya demokrasi di Taiwan. Sesuai dengan apa yang diungkapkan Barry Buzan yang mana ancaman politik termasuk juga termasuk dalam ideologi (Barry Buzan, 1998, hal. 150). Demokrasi termasuk dalam ideologi. Karena ideologi Tiongkok dan Taiwan berbeda, Tiongkok menanamkan ideologi komunis sedangkan Taiwan menanamkan ideologi demokratis. Hal ini merupakan ancaman bagi Tiongkok karena Taiwan dan Tiongkok memiliki ideologi yang berlawanan sehingga dapat membuat masyarakat Taiwan semakin

jauh dengan Tiongkok, seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya (Wang, 2017, hal. 3).

Selanjutnya, ancaman pada sektor keamanan yang terakhir yaitu *Economic Sector*. Dalam sektor ekonomi, objek referensi yaitu individu, subsistem hingga negara (Barry Buzan, 1998, hal. 100). Namun, dalam ancaman keamanan ekonomi lebih sulit untuk dijelaskan secara spesifik karena ancaman ekonomi terdapat keterkaitan antara sektor politik dan militer (Barry Buzan, 1998, hal. 102).

Ancaman ekonomi yang berpengaruh pada stabilitas domestik, hal ini dapat terjadi ketika suatu negara mengejar kebutuhan ekonomi berdasarkan kesejahteraan negara tersebut (Barry Buzan, 1998, hal. 105). Adanya ketergantungan ekonomi dalam pasar global juga mempengaruhi keamanan ekonomi (Barry Buzan, 1998, hal. 98).

Ancaman Taiwan terhadap Tiongkok dalam sektor ekonomi yaitu terdapat Taiwan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar yang akan berdampak signifikan pada Tiongkok apabila Taiwan dapat berhasil lepas dari bagian dari Tiongkok. Seperti yang dijelaskan pada subbab sebelumnya (Riewpassa, 2014, hal. 3).

Taiwan yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, yang akan berdampak signifikan, apabila Taiwan melepaskan diri, seperti yang dijelaskan pada subbab sebelumnya. Taiwan memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan mempunyai perekonomian yang berkembang dengan pesat. Kehilangan Taiwan akan berdampak pada stabilitas domestik Tiongkok. Karena, Tiongkok mempunyai hubungan kerja sama ekonomi dengan Taiwan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tiongkok, yang sesuai dengan ancaman ekonomi menurut Buzan (Barry Buzan, 1998, hal. 105).

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ancaman-ancaman posisi Taiwan bagi Tiongkok, sesuai dengan sektor keamanan menurut Barry Buzan. Untuk lebih jelasnya, keterkaitan ancaman tersebut dengan sektor keamanan digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3: Ancaman Posisi Taiwan bagi Sektor Keamanan Tiongkok

| No | Sektor Keamanan menurut Buzan | Ancaman Posisi Taiwan bagi Tiongkok |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | <i>Military Sector</i> | Hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan; pasokan senjata dari Amerika Serikat |
| 2. | <i>Political Sector</i> | Usaha Taiwan untuk mendapatkan rekognisi sebagai negara berdaulat; berusaha dapat berpartisipasi di PBB , Taiwan jatuh dalam kekuasaan negara lain; karena memiliki wilayah yang strategis , Demokrasi di Taiwan; ideologi yang berlawanan dengan Tiongkok |
| 3. | <i>Economic Sector</i> | Potensi ekonomi Taiwan cukup besar; sumber daya alam Taiwan yang mumpuni |

Dengan demikian, dalam bab II ini telah membahas beberapa hal, yaitu: *Pertama*, dinamika hubungan Tiongkok dan Taiwan dalam masa Xi Jinping. *Kedua*, posisi Taiwan sebagai ancaman keamanan Tiongkok, yang menjelaskan ancaman posisi Taiwan bagi Tiongkok. *Ketiga*, analisis ancaman keamanan posisi Taiwan pada Tiongkok. Dapat disimpulkan, dari kelima ancaman yang dirasakan oleh Tiongkok apabila Taiwan dapat lepas dari negaranya.

Ancaman yang teridentifikasi pada bab ini sesuai dengan apa yang dijelaskan Barry Buzan terkait sektor keamanan. Antara lain adanya kerja sama Taiwan dan Amerika Serikat dalam pasokan senjata yang termasuk ancaman pada sektor militer. Dan adanya usaha Taiwan untuk mendapatkan rekognisi sebagai negara berdaulat, Tiongkok tidak ingin Taiwan merdeka dan jatuh dalam kekuasaan negara lain serta adanya demokrasi di Taiwan termasuk

dalam ancaman pada sektor politik. Dan ancaman Taiwan memiliki potensi ekonomi yang besar, yang mana hal ini termasuk dalam ancaman pada sektor ekonomi.

Setelah mengidentifikasi ancaman tersebut, maka bab berikutnya akan mengidentifikasi sikap yang diambil Tiongkok, masih dengan menganalisis menggunakan sektor keamanan menurut Barry Buzan. Kemudian, pembahasan selanjutnya yang akan ditulis pada bab III adalah tentang strategi Tiongkok untuk menjadikan Taiwan tetap menjadi bagian dari negaranya. Yang akan mengaitkan sesuai dengan apa yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya.